

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sesuai dengan yang kita ketahui bahwa penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran bagi negara yang cukup besar adalah dari penerimaan sektor Pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% pada tahun 2016 dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Sumber: www.pajak.go.id, 2016). Pajak yang telah dipungut oleh negara sudah berdasarkan atas undang – undang yang telah diberlakukan dan sudah ditetapkan atas penghasilan Orang Pribadi (OP) maupun Badan tertentu.

Pada tahun 2017 kontribusi penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.498,9 triliun atau mencapai 85% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), serta pada tahun 2016 kontribusi penerimaan atas pemasukan Negara dari penerimaan perpajakan adalah sebesar 75% dari total keseluruhan pendapatan Negara atau sekitar Rp 1.360,2 triliun dan 15% dari pendapatan Negara bukan pajak atau sekitar Rp 273,8 triliun dan sisanya 10% dari kepabeanan, cukai dan hibah yaitu sekitar Rp 275,0 triliun. Tahun 2015 kontribusi pajak mencapai Rp. 1.201,7 triliun atau sekitar 67% dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (kementerian keuangan 2017). Perlu kita pahami bahwa iuran pajak dipungut dari rakyat untuk kepentingan negara. Selain itu pajak berprinsip pada Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 pajak yang telah disetorkan rakyat tidak begitu langsung terasa imbalannya, negara perlu mengelola terlebih dahulu uang yang disetor dari rakyat untuk pembangunan dan kebutuhan negara. Selain itu negara mampu memberikan pembiayaan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat di Indonesia. Namun kesadaran akan membayar pajak sangatlah kurang bagi

masyarakat awam, mereka beranggapan membayar pajak sangatlah rumit bahkan mereka beranggapan sangatlah susah dimengerti, sebab karena itu masyarakat enggan membayar pajak pada pemerintah. Peran pemerintah disini sangatlah penting bagi masyarakat pemerintah dapat mensosialisasikan dan memberikan pencerahan lagi bagaimana cara membayar pajak yang benar agar masyarakat awam dapat mengerti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara, namun untuk tercapainya target tersebut juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan wajib pajak itu sendiri. Untuk itu sangat perlu diusahakan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Masyarakat harus menyadari bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang terbesar diterima oleh negara adalah PPN. SPT masa PPN ada dua jenis formulir yaitu SPT masa 1111 dan SPT 1111 DM. Dua jenis SPT masa tersebut mengandung perhitungan serta perlakuan yang berbeda dan tata cara pengisian yang berbeda pula maka penting untuk dibahas. Pelaporan SPT masa PPN dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Peran serta pemerintah sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bagi wajib pajak dengan baik dan benar. Selain itu dengan adanya aturan yang jelas perusahaan dapat menyetor pajak dengan mudah dan tertib. *Self assessment* system yang diterapkan di Indonesia yang berarti pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang sendiri (Sumber: Mardiasmo, 2011). *Self assesment* yang diterapkan pemerintah Indonesia membuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnya sendiri. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman yang baik dan benar dalam mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak perusahaan, sehingga pajak perusahaan yang dilaporkan jelas dan dapat di pertanggung jawabkan.

Salah satu jenis pajak yang merupakan pendapatan atau sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut (Sumber: www.online-pajak.com).

Pajak Pertambahan Nilai juga membantu wajib pajak baik badan maupun orang pribadi untuk melakukan transaksi, salah satunya dengan menggunakan fasilitas PPN DM (deemed) atau pedoman pengkreditan pajak masukan. PPN DM (deemed) dapat digunakan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dengan adanya fasilitas PPN DM (deemed) perusahaan dapat lebih mudah saat melakukan transaksi dengan lawan transaksinya.

Seperti salah satu perusahaan yang dijadikan bahan penelitian oleh penulis, ini adalah CV. LJ yang bergerak di bidang jasa penjualan elektronik, perusahaan dipilih karna penulis menemukan adanya penggunaan pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan (deemed). Penulis menemukan CV. LJ menggunakan pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan (deemed) di transaksi penjualan yang disebut PPN DM (deemed) atas Barang Kena Pajak (BKP). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa mengenai penerapan, perhitungan, penyeteroran dan pelaporan SPT menggunakan PPN DM (deemed) CV. LJ atas transaksi penjualan yang dilakukan, dengan mengangkat judul **“PELAPORAN SPT MASA PPN DM PADA USAHA DAGANG STUDI PADA USAHA PERDAGANGAN ELEKTRONIK CV.LJ”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas penulis akan menguraikan beberapa pertanyaan yang nantinya akan di bahas, antara lain :

1. Bagaimana transaksi pembelian dan penjualan CV. LJ selama tahun 2016 ?
2. Bagaimana pelaksanaan pelaporan SPT masa PPN pada CV. LJ selama tahun 2016 ?
3. Bagaimana perbandingan penghitungan PPN antara SPT 1111 DM dan SPT 1111 ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui transaksi pembelian dan penjualan CV. LJ selama tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan SPT masa PPN pada CV. LJ selama tahun 2016.
3. Untuk menjelaskan penghitungan PPN antara SPT 1111 DM dan SPT 1111.

1.4 MANFAAT PENULISAN

Dari hasil penelitian ini penulis manfaat yang diharapkan penulis adalah :

1. Bagi Wajib Pajak

Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang bagaimana

melaporkan SPT Masa PPN DM serta penghitungan baik menggunakan SPT masa PPN 1111 ataupun 1111 DM.

2. Bagi KKP

Dapat dijadikan contoh dan referensi tambahan lagi untuk penghitungan, penyetoran dan pelaporan spt PPN DM untuk perusahaan lain menurut undang – undang yang berlaku.

3. Bagi Penulis

- Menambah pengetahuan yang lebih dalam lagi terkhusus dari PPN DM.
- Berguna bagi penulis untuk mengetahui cara – cara penerapan, perhitungan, dan pelaporan spt PPN DM.
- Dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari Praktek Kerja Lapangan dengan baik dan sesuai menurut UU Perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan sistematika mengenai gambaran atau pembahasan tentang laporan ini pada kelima bab berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan Masalah, manfaat dan sistematika laporan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menuangkan teori – teori dari berbagai sumber yang berhubungan untuk membantu

Menguatkan tentang penelitian ini dan digunakan
Juga untuk dasar pedoman penulis dalam menyusun
Tugas akhir.

BAB II: GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang kantor
CV. INDO KARYA KONSULTAN dimana penulis
melakukan penelitian dan metode ini sebagaimana apa
saja yang digunakan penulis melakukan penelitian
sehingga terbentuknya laporan ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang CV. LJ
serta memaparkan dan menjelaskan mengenai
penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan dengan jelas apa
yang menjadi kesimpulan dari pembahasan laporan ini
serta memberikan saran sebagai penyelesaian dari
penulisan ini.